

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Pelaksanaan Kemitraan Usaha

1. Pengertian Kemitraan

Kemitraan secara etimologis berasal dari kata *partnership* yang berasal dari suku kata *partner* yang berarti kawan, sekutu atau mitra. Secara definisi, maka kemitraan adalah suatu bentuk kerja sama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas di suatu bidang usaha tertentu atau tujuan tertentu sehingga memperoleh hasil yang lebih baik.³² Kemitraan dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu dengan melalui model-model dalam penerapan kemitraan itu sendiri.

a. *Pseudo Partnership* (Kemitraan Semu)

Merupakan persekutuan yang terjadi antara dua pihak atau lebih, namun tidak sesungguhnya melakukan kerjasama secara seimbang satu dengan yang lain. Bahkan ada satu pihak yang belum tentu memahami secara benar akan makna sebuah kerjasama yang dilakukan, dan untuk tujuan apa itu semua dilakukan serta disepakati.

b. *Mutualisme Partnership* (Kemitraan mutualistik)

Merupakan persekutuan dua pihak atau lebih yang sama-sama menyadari aspek pentingnya melakukan kemitraan, yaitu saling

³² Sulistiyan, Ambar Teguh, *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*, (Jakarta : Gaya Media, 2004), h. 129.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan manfaat lebih, sehingga akan mencapai tujuan secara optimal. Berangkat dari pemahaman akan nilai pentingnya melakukan kemitraan, dua organisasi atau kelompok atau lebih yang memiliki status sama atau berbeda melakukan kerjasama. Manfaat silang saling antara pihak-pihak yang melakukan kerjasama dapat diperoleh sehingga sekaligus saling menunjang satu dengan yang lainnya.

- c. *Conjugation Partnership* (kemitraan melalui peleburan atau pengembangan)

Merupakan kemitraan yang dianalogikan sebagai *paramecium*. Dua *Paramecium* melakukan konjungsi untuk mendapatkan energi dan kemudian terpisah satu sama lain dan selanjutnya dapat melakukan pembelahan diri. Bertolak dari analogi tersebut, maka suatu organisasi atau kelompok-kelompok, perorangan yang memiliki kelemahan di dalam melakukan usaha atau kegiatan dapat melakukan kemitraan dengan medel lain. Dua pihak atau lebih dapat melakukan konjungsi dalam rangka meningkatkan kemampuan masing-masing.³³

Pengertian kemitraan itu sendiri termuat dalam Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil dimana kemitraan adalah kerjasama antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh

³³*Ibid* , h. 130

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.

Definisi lain diungkapkan oleh Hafsah yang menyatakan bahwa kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama, dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Karena merupakan strategi bisnis maka keberhasilan kemitraan sangat ditentukan oleh adanya kepatuhan diantara yang bermitra dalam menjalankan etika bisnis.³⁴

2. Latar Belakang Kemitraan

Latar belakang timbulnya hubungan kemitraan antara pengusaha besar dengan pengusaha kecil antara lain:

- a. Latar belakang pengusaha besar bermitra dengan pengusaha kecil
 - 1) Adanya imbauan pemerintah tentang kemitraan pengusaha besar dengan pengusaha kecil atau petani yang direalisasikan melalui Undang-Undang Perindustrian Nomor 5 Tahun 1981 dan SK Menteri Keuangan No. 316.
 - 2) Adanya imbauan bisnis (ekonomi) dimana pengusaha besar yang bermitra dengan pengusaha kecil akan lebih diuntungkan dari pada mengerjakan sendiri.
 - 3) Tanggung jawab sosial, yaitu kepedulian dari pengusaha besar untuk memajukan dan mengembangkan masyarakat sekitar.

³⁴ Hafsah, MJ., *Kemitraan Usaha : Konsepsi Dan Strategi*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2003), h. 16

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Latar Belakang Pengusaha Kecil Bermitra Dengan Pengusaha Besar.
- 1) Adanya jaminan pasar yang pasti.
 - 2) Mengharapkan adanya bantuan dalam hal permodalan, pembinaan dan pemasaran.
 - 3) Kerjasama dengan pengusaha besar dirasa akan lebih menguntungkan, baik dari segi harga, jumlah, dan kepastian, maupun dari segi promosi.

3. Tujuan Kemitraan

Berkaitan dengan kemitraan seperti yang telah disebutkan di atas, maka kemitraan itu mengandung beberapa unsur pokok yang merupakan kerjasama usaha dengan prinsip saling menguntungkan, saling memperkuat dan saling memerlukan yaitu:

a. Kerjasama Usaha

Dalam konsep kerjasama usaha melalui kemitraan ini, jalinan kerja sama yang dilakukan antara usaha besar atau menengah dengan usaha kecil didasarkan pada kesejajaran kedudukan atau mempunyai derajat yang sama terhadap kedua belah pihak yang bermitra. Ini berarti bahwa hubungan kerjasama yang dilakukan antara pengusaha besar atau menengah dengan pengusaha kecil mempunyai kedudukan yang setara dengan hak dan kewajiban timbale balik sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, tidak ada yang saling mengeksploitasi satu sama lain dan tumbuh berkembangnya rasa saling percaya diantara para pihak dalam mengembangkan usahanya.³⁵

³⁵Julius Bobo, *Transpormasi Ekonomi Rakyat*, (Jakarta: PT Pustaka Cidesindo, 2003), h.182.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan hubungan kerjasama melalui kemitraan ini diharapkan pengusaha besar atau menengah dapat menjalin hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan pengusaha kecil atau pelaku ekonomi lainnya sesuai dengan prinsip-prinsip kemitraan, sehingga pengusaha kecil akan lebih berdaya dan tangguh di dalam berusaha demi tercapainya kesejahteraan.

1) Pembinaan dan Pengembangan

Pada dasarnya yang membedakan hubungan kemitraan dengan hubungan dagang biasa oleh pengusaha kecil dengan pengusaha besar adalah adanya bentuk pembinaan dari pengusaha besar terhadap pengusaha kecil atau koperasi yang tidak ditemukan pada hubungan dagang biasa. Bentuk pembinaan dalam kemitraan antara lain pembinaan di dalam mengakses modal yang lebih besar, pembinaan manajemen usaha, pembinaan peningkatan Sumber daya Manusia (SDM), pembinaan manajemen produksi, pembinaan mutu produksi serta menyangkut pula pembinaan di dalam pengembangan aspek institusi kelembagaan, fasilitas alokasi serta investasi.

2) Prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Kemitraan merupakan suatu rangkaian proses yang dimulai dengan mengenal calon mitranya, mengetahui posisi keunggulan dan kelemahan usahanya. Pemahaman akan keunggulan yang ada akan menghasilkan sinergi yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdampak pada efisiensi, turunya biaya produksi dan sebagainya. Penerapannya dalam kemitraan, saling membutuhkan berarti pengusaha besar memerlukan pasokan bahan baku dari pengusaha kecil, begitu juga pengusaha kecil memerlukan penampungan hasil dan bimbingan, saling memperkuat berarti pengusaha kecil dan pengusaha besar sama-sama melaksanakan etika bisnis, sama-sama mempunyai persamaan hak dan saling membina sehingga memperkuat kesinambungan bermitra, saling menguntungkan berarti pengusaha kecil maupun pengusaha besar memperoleh peningkatan atau keuntungan disamping adanya kesinambungan usaha.³⁶

Tujuan kemitraan adalah agar mitra usaha dapat menerima dan menggunakan nilai-nilai baru dalam berusaha, seperti perluasan wawasan, prakarsa dan kreatifitas, berani mengambil resiko, etos kerja, kemampuan aspek-aspek manajerial, bekerja atas dasar perencanaan dan berwawasan kedepan.³⁷ Adapun tujuan kemitraan berdasarkan pendekatan structural adalah:

³⁶ S.Martidirejo, Widodo A.S, *Agribisnis Kemitraan Usaha Bersama*, (Yogyakarta : Penerbit Kanisius, 2002), h.11.

³⁷ Jafar Hasfah, *Kemitraan Usaha, Konsepsi dan Strategi*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2009), h. 62-63.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Saling mendukung, saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan antara usaha kecil dan besar melalui ikatan kerjasama ke depan dan ke belakang.
- 2) Menciptakan nilai tambah efisiensi dan produktivitas usaha bagi kedua belah pihak yang akan memperkuat ekonomi dan industri nasional sehingga menjadi tulang punggung pembangunan dan tatanan dunia usaha.
- 3) Menciptakan dan meningkatkan alih pengetahuan, keterampilan, manajemen, dan teknologi sehingga menjadi bekal masyarakat untuk turut berperan sebagai pemain yang dominan di pasar global.
- 4) Mengatasi kesenjangan sosial yang selama ini merupakan masalah yang sangat sulit untuk dipecahkan.

Namun demikian secara keseluruhan tujuan yang di ingin dicapai melalui sebuah kemitraan itu adalah:³⁸

- a. Meningkatkan pendapatan usaha kecil dan masyarakat
- b. Meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelaku kemitraan.
- c. Meningkatkan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat dan usaha kecil.
- d. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan.
- e. Memperluas kesempatan kerja.

³⁸*Ibid*, h.4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Pola Kemitraan³⁹

Pola kemitraan merupakan kerjasama yang dilakukan antara perusahaan dengan petani mitra dalam upaya pengelolaan usaha pertanian atau perikanan. Dalam pola kemitraan menjadi daya tarik dalam menjalankan usaha, namun dalam menjalankan usaha dengan pola kemitraan tidak semudah yang dibayangkan. Kemitraan dapat menjadi solusi bagi perkembangan dan kemajuan petani dengan keterbatasan modal. Beberapa jenis pola kemitraan yang telah banyak dilaksanakan sebagai berikut:⁴⁰

a. Pola Inti Plasma

Kemitraan Inti Plasma memberikan manfaat timbal balik antara pengusaha besar atau menengah sebagai Inti dengan usaha kecil sebagai Plasma melalui cara pengusaha besar atau menengah memberikan pembinaan serta penyediaan sarana produksi, bimbingan, pengolahan hasil serta pemasaran.

Kemitraan Inti Plasma berperan sebagai upaya memberdayakan pengusaha kecil di bidang teknologi, modal, kelembagaan sehingga pasokan bahan baku dapat terjamin dalam jumlah dan standar yang diperlukan.⁴¹

Pola kemitraan ini merupakan pola hubungan kemitraan antara petani / kelompok mitra sebagai plasma dengan

³⁹Direktorat Jendral Peternakan Tahun 2008 Tentang Pola Kemitraan Usaha.

⁴⁰Mohammad Jafar Hasfah, *Kemitraan Usaha(Konsepsi dan Strategi)*, (Jakarta:Pustaka Sinar Harapan, 2002), h.43.

⁴¹*Ibid*, h. 68

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perusahaan inti yang bermitra usaha. Pasal 27 huruf (a) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995, menerangkan pengertian pola inti plasma adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar sebagai inti membina dan mengembangkan usaha kecil yang menjadi plasmanya.

b. Pola Sub Kontrak

Pola kemitraan dalam subkontrak adalah suatu sistem yang menggambarkan hubungan antar usaha besar dengan usaha kecil atau menengah, dimana usaha besar sebagai perusahaan induk (*Parent firm*) meminta kepada usaha kecil atau menengah selaku subkontaktor untuk mengerjakan seluruh atau sebagian pekerjaan (Komponen) dengan tanggung jawab penuh dengan perusahaan induk.⁴²

Kegiatan perusahaan mitra :

- 1) Membeli komponen produksi yang dihasilkan oleh kelompok mitra.
- 2) Menyediakan bahan baku / modal kerja.
- 3) Melakukan kontrol kualitas produksi.

Kegiatan kelompok mitra:

- 1) Memproduksi kebutuhan yang dibutuhkan oleh perusahaan mitra.

⁴²Sumardjo, *Kemitraan Dalam Pengembangan Ekonomi Lokal (Bunga Rampai), Tinjauan Konsepsi Kemitraan di Masa Lalu*. (Jakarta: Yayasan Mitra Pembangunan Desa-Kota, 2001), h. 112.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Menyediakan tenaga kerja.
- 3) Membuat kontrak bersama yang mencantumkan volume, harga, dan waktu.

c. Pola Kerjasama Operasional Agribisnis (KOA)

Pola KOA adalah hubungan kemitraan antara petani / kelompok mitra dengan perusahaan mitra, yang di dalamnya petani kelompok mitra yang menyediakan lahan, sarana dan tenaga kerja, sedangkan perusahaan mitra menyediakan biaya atau modal serta sarana untuk mengusahakan dan membudidayakan suatu komoditi pertanian.⁴³

4) Peranan Pelaku Kemitraan

Sebagai upaya untuk mengujudkan kemitraan usaha yang mampu memberdayakan ekonomi rakyat, sangat dibutuhkan adanya kejelasan peran masing-masing pihak yang terlibat dalam kemitraan tersebut. Berbagai peran dari pelaku kemitraan usaha tersebut adalah sebagai berikut:

a. Peranan pengusaha besar

Peranan pengusaha/ perusahaan pembimbing antara lain:

- 1) Perusahaan menyediakan rancangan kerja agribisnis.
- 2) Pengusaha sebagai penyangga dan atau penjamin kredit untuk permodalan mitranya.
- 3) Melaksanakan pengemasan dan pemasaran.

⁴³Mohammad Jafar Hasfah, *Loc, cit.* h.76

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Menyediakan tenaga penyuluh untuk memberikan bimbingan kepada mitranya.
- 5) Memberikan pelayanan dan menyediakan segala keperluan untuk keperluan bersama yang telah disepakati.
- 6) Pengusaha menjamin akan membeli produksi sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui.
- 7) Pengusaha membayar semua hasil produksi sesuai dengan kesepakatan.

b. Peranan pengusaha kecil

Dalam kerja sama kemitraan, pengusaha kecil banyak berperan dalam kegiatan budidaya, antara lain:

- 1) Kelompok pengusaha kecil menyusun rencana kerja, dengan berpedoman pada hasil kesepakatan dengan pengusaha besar.
- 2) Melaksanakan usaha dengan teknologi dan ketentuan dengan hasil kesepakatan dengan pengusaha besar mitranya.
- 3) Pengusaha kecil berkewajiban mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan dan perjanjian sesuai dengan kesepakatan bersama.

B. Kemitraan Usaha Dalam Ekonomi Islam

Di dalam Islam segenap aspek kehidupan bisnis dan transaksi memiliki sebuah sistem perekonomian yang berbasiskan nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits, serta dilengkapi dengan Ijma' dan Qiyas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sistem ekonomi dalam Islam saat ini dikenal dengan istilah sistem ekonomi syariah kaedah hukum asal syariah yang berlaku dalam urusan muamalah adalah bahwa semuanya dibolehkan kecuali ada ketentuan dalam Al-Qur'an dan hadist yang melarangnya. Seperti kaedah fiqihnya yang berbunyi:⁴⁴

أَلَا صَلُّ فِي الْمَعَامَلَةِ إِلَّا بِحَاةٍ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهِ

Artinya: *"Hukum asal semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya".*

Maksud kaedah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerjasama (*Mudharabah dan Musyarakah*), perwakilan, dan lain-lain, sepanjang tidak ada larangan dari Allah ataupun Rasul-Nya.

Islam adalah agama yang universal dan dinamis, aspek yang dibawanya dapat menampung dan menyelesaikan semua persoalan, baik di bidang ibadah maupun yang berhubungan dengan muamalah.⁴⁵ Islam memberikan pedoman bagi umat manusia yang menjamin akan mendatangkan kebahagiaan hidup perorangan dan kelompok, jasmani dan rohani, di dunia saat ini dan di akhirat kelak.

Manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain, sebab Allah telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan

⁴⁴ Djazuli, *Kaedah-kaedah Fikih: Kaedah-kaedah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis*, (Jakarta:Kencana, 2006), Ed.1, Cet.1. h.128-137.

⁴⁵ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Pres, 2001), h.13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

satu sama lain. Supaya mereka tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jual beli, sewa-menyewa, bercocok tanam atau perusahaan yang lain-lain baik untuk urusan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum.

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa lepas untuk berhubungan dengan orang lain dalam kerangka memenuhi kebutuhan hidupnya, kebutuhan manusia sangat beragam, sehingga terkadang secara pribadi ia tidak mampu memenuhinya dan harus berhubungan dengan orang lain.⁴⁶ Hal itulah yang menjadi alasan utama manusia untuk bekerjasama dalam pemenuhan kebutuhan hidup mereka.

1. *Qord Al-Hasan*

a. Pengertian *Qord Al-Hasan*

Qord Al-Hasan menurut kamus istilah fiqih *qord al-hasan* sama dengan *Qoradh Hasan* artinya pinjaman yang baik. Yaitu mengembalikan pinjaman lebih dari jumlah yang dipinjamkan dengan ikhlas tanpa ada syarat sebelumnya.⁴⁷

Qord al-Hasan adalah suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata, dimana pinjaman tidak berkewajiban untuk mengembalikan apapun kecuali modal pembiayaan dan administrasi. Jenis *qord al-hasan* adalah jenis pembiayaan tanpa laba dimana Al-qur'an mendorong kaum muslim agar mengadakannya untuk kalangan membutuhkan peminjam berkewajiban mengembalikan hanya

⁴⁶ Dimyauddin, Djuwaaini, *Pengantar Fikih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h.47.

⁴⁷ M.Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta:Pustaka Firdaus, 1994), h. 272

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pokok pinjaman saja, tetapi boleh memberikan kelebihan menurut kebijaksanaannya dan keihlasannya.

Sedangkan *qord al-hasan* menurut fatwa DSN No.19/DSN-MUI/IV/2001 adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan. Nasabah *qord al-hasan* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.⁴⁸

Qord Al-Hasan adalah juga sebagai bentuk pembiayaan berbentuk pinjaman kebajikan yang diberikan oleh lembaga selaku *sahibul mal* (pemilik harta) kepada anggota yang memerlukan dana untuk keperluan yang bermanfaat.

Pada dasarnya hukum asal dari *qord al-hasan* adalah tolong menolong antara orang yang mampu dengan orang yang tidak mampu, ataupun sesama orang yang mampu pun ada kemungkinan saling pinjam-meminjam atau hutang-menghutang. Akan tetapi tidak semua pinjam meminjam dibenarkan oleh syara'. Hukum *qord al-hasan* itu bisa saja berubah-ubah sesuai dengan kondisi dan situasinya masing-masing, bisa berubah jadi wajib disebabkan orang yang meminjam sangat membutuhkannya.⁴⁹

Maka dapat disimpulkan bahwa *qord al-hasan* adalah akad perjanjian pinjam meminjam dari seseorang atau lembaga (*muqtaridh*)

⁴⁸ Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah dari Beberapa Segi Hukum*, (Bogor:Ghalia Indonesia, 2009), h. 110-111.

⁴⁹ Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar II* (Jakarta:Kalam Mulia, 1950), h. 360

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama selama jangka waktu yang telah ditentukan dengan tujuan saling tolong-menolong tidak hanya dilakukan dilingkup yang sempit karena apapun yang kita lakukan selalu membutuhkan orang lain. Maka dari itu tolong menolong menjadi suatu nilai yang terkandung dalam ekonomi islam, para ekonomi Islam selalu dituntut agar dapat membantu saudaranya keluar dari permasalahan yang dihadapinya, seperti menolong yang lemah dan membantu orang yang memerlukan bantuan.

2. Dasar Hukum *Qord Al-Hasan*

Dasar-dasar hukum yang digunakan dalam *qord al-hasan* berdasarkan beberapa ayat-ayat dari Al-Quran, diantaranya dalam firman Allah SWT yang telah digambarkan secara umum mengenai pinjam-meminjam, yaitu dalam surah Al-Maidah ayat 2.

وَتَعَاوُنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوُنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ
إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “*dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.*”(QS. Al-Maidah : 2)⁵⁰

Dalam tafsir Al-Maidah dijelaskan bahwa pada ayat diatas Allah menyuruh manusia untuk saling tolong menolong dalam hal kebajikan,

⁵⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung:J-ART, 2005), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yakni segala bentuk dan macam hal yang membawa kepada kemaslahatan duniawi, demikian juga Allah SWT menyuruh manusia saling tolong menolong dalam ketakwaan, yakni segala upaya dapat menghindarkan diri dari bencana duniawi dan ukhrawi yang didasarkan kepada penegakan takwa, yaitu mencegah perbuatan tolong menolong dalam perbuatan dosa.⁵¹

Allah juga berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ ۖ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya: " siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.(QS. Al-Hadid : 11).

Ayat ini menegaskan untuk meminjamkan kepada orang lain yang dilakukan karena Allah adalah bagaikan member pinjaman kepada Allah, yang pasti dibayar dengan berlipat ganda, dan berfungsi sebagai penguat dorongan berinfak.

Dalam hadist Nabi Muhammad SAW bersabda:

Artinya: *Dari Ibnu Mas'ud r.a, bahwa Nabi SWA bersabda: tidaklah seorang muslim memberikan pinjaman kepada muslim lainnya sebanyak dua kali pinjaman, melainkan layakanya ia telah menyedekahkannya dua kali (HR. Ibnu Majah)⁵²*

⁵¹ M. Quraish Shahib, *Tafsir Al-Misbah: Pesan dan Keresasian Al-Qur'an, Volume 1*, (Jakarta: Lentera Hati 2002), h. 10

⁵² Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah, No.2421*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h.414.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Rukun dan Syarat *Qord Al-Hasan*

Salah satu dari dalam transaksi ekonomi Islam adalah *qord al-hasan* dan tentulah memiliki rukun. Rukun adalah sesuatu yang harus ada pada suatu pekerjaan atau amal ibadah. Adapun rukun dari *qord al-hasan* adalah sebagai berikut:

- a. Orang yang meminjamkan pinjaman (*Mugtaridh*)
- b. Pihak yang memberi pinjaman (*muqridh*)
- c. Objek akad yang merupakan pinjaman yang dipinjamkan oleh pihak yang menerima pinjaman (dana)
- d. *Ijab qobul* (sighat) perkataan yang diucapkan oleh pihak yang menerima pinjaman dari orang yang member pinjaman atau ucapan yang mengandung adanya izin yang menunjukkan kebolehan untuk mengambil manfaat dari pihak yang menerima pinjaman.

Sedangkan syarat *qord al-hasan* yang harus dipenuhi adalah:

- a. Kerelaan antara kedua belah pihak
- b. Dana digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat dan halal.⁵³

4. Sumber Dana *Qord Al-Hasan*

Dana pinjaman *qord al-hasan* menggunakan akad *tabarru'* yakni jenis akad yang berkaitan dengan transaksi non profit atau transaksi yang tidak bertujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Akad *tabarru'* lebih berorientasi pada kegiatan tolong menolong. Dalam hal ini pihak yang berbuat baik tidak boleh mensyaratkan adanya imbalan dalam

⁵³ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktek Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), h. 26.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bentuk apapun. Imbalan yang boleh diharapkan hanya imbalan dari Allah SWT. *Qord al-hasan* yang diperlukan untuk membantu usaha yang sangat kecil dan keperluan sosial, dapat bersumber dari zakat, infak dan sedekah.

Dari pemaparan diatas bahwa sumber dana yang digunakan dalam pembiayaan yang berbentuk pinjaman *qord al-hasan* yaitu dari dana sosial, yang bersumber dari zakat, infak dan sedekah dapat dikembangkan kedalam akad *qord al-hasan*.⁵⁴

5. Ketentuan umum *qord al-hasan*

- a. *Al-Qord* adalah pinjaman yang diberikan kepada masyarakat yang memerlukan
- b. *Al-qord* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
- c. Biaya administrasi dibebankan kepada penerima dana *qord*
- d. Masyarakat yang dapat dana *qord* dapat memberikan sumbangan atau tambahan dengan suka rela kepada pihak lembaga pemberi pinjaman selama tidak diperjanjikan dalam akad.
- e. Jika pihak penerima dana tidak dapat mengembalikan sebahagian atau seluruh kewajibannya pada saat telah disepakati dan pihak pemberi pinjaman dapat: memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau menghapus sebahagian atau seluruh kewajibannya.⁵⁵

⁵⁴Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h.133

⁵⁵Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 143